

1. LOCAL GOVERNMENT
2. PROVISION

KIK
THP 05/02
sof
P

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999



Oleh :

**AJI MUHAMAD SOFYAN
NIM. 030010034 M**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 1999**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Hukum
Minat Studi Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Oleh :

AJI MUHAMAD SOFYAN
NIM. 030010034 M

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2002

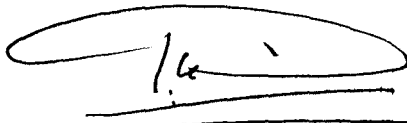
LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini Disetujui

Tanggal 11 Maret 2002

Oleh


Pembimbing



Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.
NIP. 130 541 986

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis Dan Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.
NIP. 130 350 732

Telah diuji pada tanggal 11 Maret 2002

PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA : Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.

ANGGOTA : 1. Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H.

2. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS.

3. Himawan Estu Bagijo, S.H., MH.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah S.W.T. saya dapat menyelesaikan Tesis yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa dan mahasiswi dalam proses akhir penyelesaian studi pada Program Pascasarjana (S2) di Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H. selaku pembimbing Tesis ini, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan penuh perhatian, kesabaran dan ketelitian hingga selesainya penulisan Tesis ini.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

- Bapak H. Machsoen Ali, S.H. MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan selama masa pendidikan;
- Bapak Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Para dosen penguji yang telah banyak memberikan saran, petunjuk dan masukan berharga bagi penyempurnaan Tesis ini, yaitu :
 - Bapak Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.

- Bapak Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H.
- Ibu Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS.
- Bapak Himawan Estu Bagijo, S.H., MH.
- Isteri dan anak-anakku yang senantiasa dan tak bosan-bosannya memberikan dorongan agar dapat segera menyelesaikan Pendidikan Magister Hukum Minat Studi Hukum Pemerintahan.

Kepada semua pihak yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan nasehat, dorongan serta bantuannya baik moril maupun materiil selama saya mengikuti studi pada Program Pascasarjana (S2) di Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, Maret 2002

Penulis

RINGKASAN

Salah satu permasalahan yang paling menonjol di era pelaksanaan otonomi daerah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 ialah pertanggungjawaban Kepala Daerah dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 yang merupakan implementasi dari UU tersebut telah ditetapkan proses dan tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah yang terdiri dari laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan serta laporan pertanggungjawaban karena hal-hal tertentu.

Polemik yang terjadi antara Kepala Daerah dan DPRD karena adanya beda penafsiran terhadap Peraturan Pemerintah tersebut terutama pada pasal yang mengatur tentang pemberhentian Kepala Daerah yang apabila pertanggungjawabannya ditolak oleh DPRD.

Problematikanya ada pada parameter, tolok ukur penilaian pertanggungjawaban yang hanya didasarkan pada Rencana Strategi (Renstra) serta posisi DPRD yang dirasakan lebih kuat dari Kepala Daerah.

Pemberhentian Walikota Surabaya H. Sunarto Sumoprawiro oleh DPRD adalah pemberhentian Kepala Daerah ditengah jalan dalam masa jabatannya dan merupakan kasus pertama sejak dimulainya pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 108 Tahun 2000.